

Kerugian Negara Membengkak

Proposal Bansos Kutim Capai 4000, Hari Ini Atasan Shinta Diperiksa

Sangatta- Kasus bantuan sosial (bansos) fiktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pekab Kutim) dengan tersangka Shinta Fensylvania kian mengelinding. Keterlibatan Shinta hanya fenomena “gunung es” karna diduga melibatkan pegawai lainnya dengan nilai dana miliaran rupiah.

Dari keterangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta, angka kerugian negara mulai membengkak. Jika di awal pengusutan Shinta disebutkan sebesar Rp 800 juta, ini bertambah menjadi Rp 1 miliar lebih.

Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sangatta Didik Farkhan, saat ditemui *Kaltim Post*, kemarin (1/7). “Totalnya bertambah, kami sudah telusuri sedikit demi sedikit,”kata Didik.

Kasus bansos yang diperkuat proposal palsu ini sebenarnya bukan bidikan terbaru. Baik Kejari maupun Polres utim telah mengintai sejak 2010 silam, jumlah proposal yang masuk pemohon pada akhir 2010 silam. Seperti pernah dimuat *Kaltim Post* dua tahun silam, jumlah proposal yang masuk oleh pemohon pada akhir 2010 di bagian sosial Pekab Kutim mencapai 4000 proposal. Melihat jumlah yang masuk, dengan persetujuan minimal senilai Rp 50 juta per item, bisa dipastikan nilainya mencapai ratusan miliar.

Bansos ribuan itu sebetulnya juga telah memakan korban bernama Fahrul. Terpidana mantan bendahara Bagian Sosial itu terbukti menyelip uang puluhan miliar dari aksinya. Berdasarkan putusan akhir oleh Mahkamah Agung, Fahrul dikenakan 8 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan dia bersalah memakan duit bansos sebesar Rp 26 miliar.

Sebagai informasi, bansos adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah pada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya yang tidak terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Namun, diakui Kajari, pada awal pembentukan Kabupaten Kutim hingga 2010, mekanisme pencairan proposal memang tergolong mudah. Alasannya, dengan luasan Kutim yang begitu besar ditambah infrastruktur kurang memadai, tim penyeleksi bansos sulit bekerja maksimal. Sehingga, kebocoran banyak ditemui saat hasil audit¹.

Kembali ke Fahrul, dari beberapa kali sidang, sebenarnya sudah mulai ditemukan titik penipuan yang tidak hanya melibatkan dirinya. Melainkan banyak staf di bagian sosial, termasuk Shinta cs.

Dalam kasus Fahrull waktu itu, terungkap kalau pembuatan proposal yang dijadikan dasar pencairan puluhan miliar rupiah dari bansos Kutim sejak tahun 2007 lalu, ternyata dibuat beberapa orang, yang ini menjadi orang kaya mendadak.

“Modalnya” berupa barang-barang seperti puluhan stempel, tanda tangan, dan berbagai guntingan kertas, yang disebut hasil *scan*, diracik menjadi proposal palsu.

Sayang, saat itu Fahrul terkesan pasang badan sehingga rekan-rekannya sesama staf Bagian Sosial bisa lepas dari jeratan kasus tersebut.

“Tapi, kasus Shinta ini kami perdalam lagi. Karena kemungkinan besar ada keterlibatan orang lain,” tegas Didik.

Sebelumnya, salah satu pegawai di lingkungan Pemkab membeberkan ketidakwajaran kekayaan para staf Bagian Sosial Kutim. Bagaimana tidak, pada 2010, hampir semua pegawai baik yang status pegawai tidak tetap (PTT)² ataupun tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) di lingkungan itu mendadak di beri kekayaan melimpah. Tentu saja dari kejadian itu melahirkan banyak kejanggalan dan pertanyaan; dari mana sumber penghasilan mereka. Padahal, banyak yang berstatus pegawai tetap³.

Dikatakan Kajari, dari ke-16 proposal fiktif (di antaranya atas nama Pemuda Peduli Pantai Pemuda Bedah Buku, hingga Pemuda Kapital) itu kemungkinan masih bertambah. Tergantung dari pemeriksaan lanjutan.

Menurut rencana, Senin (2/7) ini, Irvan selau Kasubag Kelembagaan Bagian Sosial Kutim, dan Kepala Bagian Sosial Herri Suprianto akan dipanggil sekaligus diperiksa. Penguatan pemanggilan berdasarkan informasi adanya peran aktif pemegang posisi penting di SKPD itu.

“Untuk Irvan baru sebatas saksi, karena persoalan ini beruntun. Semua ada mekanismenya. Kami tidak mau gegabah. Yang penting semua kami panggil”, jelas Didik.

Sayang, Kepala Bagian Sosial Herri belum bisa dihubungi *Kaltim Post*. Dua hari ini, panggilan telepon maupun pesan singkat ke ponselnya belum berbalas.

Sumber terpercaya harian ini di lingkungan Pemkab Kutim menilai, gaya hidup tersangka Shinta sebenarnya terlihat begitu saja. Meski demikian, kendaraan pribadi perempuan berpangkat II A (bukan III A seperti berita sebelumnya, *Red*) itu tergolong mewah.

Shinta diketahui sering memakai mobil Ford Everest KT 25 RR, dan pernah membawa mobil Honda Jazz maupun CRV. “Dari gayanya sih biasa, cuma terlihat pakai Ford Everest,” terangnya. Belum lagi tersiar kabar jika perempuan lajang berusia 31 tahun tersebut memiliki rumah mewah di Loa Bakung, Samarinda, yang hingga kini masih dipantau pihak kejaksaan.

Kasus yang menjerat Shinta terjadi pada tahun anggaran⁴ 2010. Bersama dia, turut ditetapkan sebagai tersangka adalah karyawan swasta yang bernama David. Mereka memakai proposal fiktif untuk pencairan dana. Dari yang telah diketahui, sebanyak 16 proposal dimasukkan, dengan rata-rata pencairan Rp 50 juta, sehingga kerugian negara sedikitnya 800 juta. “Yang bermain orangnya itu-itu saja,” terang Kajari Didik.

Menurut dia, otak dibalik penyaluran bansos fiktif kemungkinan besar didalangi lebih dari dua orang. Hanya, sejauh ini level pemeriksaan baru mengarah kedua tersangka. Lewat peran Khusus meloloskan proposal, sedangkan David membuka rekening sekaligus mencairkan dana di bank. Tidak menutup kemungkinan penjahat lain ikut ditahan. Terlebih posisi Shinta hanya pegawai rendah.

“Kita tuntaskan dulu yang ada, artinya mungkin dia tidak sendiri. Semua kami proses,” janji Kajari.(ede/zal)

Sumber berita: *Kaltim Post* – Senin, 2 Juli 2012, hal.1

¹ **Audit** : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (*umum*).

² **Pegawai Tidak Tetap (PPT)** : pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

³ **Pegawai Tetap** : Orang Pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola perusahaan secara langsung.

⁴ **Anggaran** : pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

JDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur